

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Jumlah penduduk yang semakin bertambah dan tidak dibarengi dengan peningkatan aset (lahan, modal, dan keahlian) yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan akan menjadi faktor penyebab kemiskinan (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2010).

Lebih lanjut Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2010) mengemukakan bahwa Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan pemerintah sebagai fasilitator.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma yang harus dikembangkan dalam menyiapkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek

penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2010).

Persoalan kemiskinan penduduk dapat disimak dari berbagai aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek psikologi dan aspek politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi.

Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, dan lemah mengantisipasi peluang.

Aspek psikologis terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir, sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, deskriminatif, dan posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan (Fadliansyah, 2010).

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki potensi-potensi dan kekayaan alam yang berlimpah, namun belum tergali secara optimal, salah satu potensi yang ada yaitu bahwa Provinsi Lampung terletak di pintu gerbang Pulau Sumatera yang seharusnya menjadi relatif berkembang dan maju di segala bidang, termasuk kesejahteraan masyarakatnya, namun kenyataannya Provinsi Lampung tergolong Provinsi miskin di pulau Sumatera. Adapun jumlah dan presentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan presentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2008-2010

Kabupaten/Kota	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin (000)					
	2008	Presentase (%)	2009	Presentase (%)	2010	Presentase (%)
Lampung Barat	86,1	21,74	79,5	19,13	71,8	17,12
Tanggamus	179,3	20,91	174,9	19,79	98,1	18,30
Lampung Selatan	351,2	35,12	222,5	22,83	188,0	20,61
Lampung Timur	228,4	23,35	206,3	20,86	200,4	21,06
Lampung Tengah	242,0	19,89	230,7	18,67	197,8	16,88
Lampung Utara	182,9	31,24	171,0	28,96	164,8	28,19
Way Kanan	84,1	22,34	79,2	20,92	76,7	18,81
Tulang Bawang	90,9	11,17	86,8	10,48	43,1	10,80
Pesawaran	-	-	100,9	22,73	81,5	20,48
Pringsewu	-	-	-	-	45,5	12,45
Mesuji	-	-	-	-	16,2	8,65
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	19,1	7,63
Bandar Lampung	130,9	15,41	123,9	14,79	128,6	14,58
Metro	22,1	15,91	21,2	15,07	20,1	13,77
Lampung	1.597,8	20,93	1.496,9	19,34	1.351,7	17,76

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, 2011

**Keterangan: (-) Data tidak tersedia

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dan presentase penduduk miskin pada tahun 2008-2010 di Kabupaten Tanggamus mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2008 Kabupaten Tanggamus memiliki presentase penduduk miskin yang masih relatif tinggi yaitu sebesar 20,91 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2009, angka tersebut mengalami penurunan yakni sebesar 19,79 %, sedangkan pada tahun 2010 presentase penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus menjadi 17,76% dari jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus. Penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan prestasi bagi pemerintah dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan.

Penanganan masalah kemiskinan selama ini telah dilakukan dengan berbagai program-program khusus penanggulangan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan pemerintah sebagai fasilitator. Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma yang harus dikembangkan dalam menyiapkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Program ini digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan program pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat perdesaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Lampung, 2010).

Lebih lanjut, PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat perdesaan melalui pinjaman modal, pembinaan kelompok masyarakat, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat baik pada proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dalam program-program pembangunan sarana dan prasarana. Pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Masyarakat perdesaan seringkali dipandang sebagai kelompok yang identik dengan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat yang tergolong miskin merupakan masyarakat yang berada di perdesaan dan daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan dari segi kepemilikan lahan, penguasaan teknologi, dan permodalan (Aquino, 2011).

Menurut Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2010), PNPM Mandiri secara nasional terdapat di 33 propinsi, 495 kabupaten/ kota dan 6.622 kecamatan di Indonesia dan dilaksanakan dalam 5 (lima) program utama, yaitu: PNPM Pedesaan, PNPM Perkotaan, PNPM daerah tertinggal & khusus, PNPM Infrastruktur Pedesaan dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. PNPM Mandiri di Propinsi Lampung terdapat di 14 kabupaten/kota dan 204 kecamatan yang tersebar di beberapa daerah yang ada di Propinsi Lampung. Rekapitulasi lokasi dan alokasi dana Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan per kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2007-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi lokasi dan alokasi dana BLM PNPM-MP per kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2007-2010

Kabupaten	Jumlah alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP (Rp. x juta)			
	2007	2008	2009	2010
Lampung Barat	1.400	14.750	28.300	45.250
Tanggamus	1.800	18.750	22.700	24.750
Lampung Selatan	2.300	20.750	41.000	44.000
Lampung Timur	2.200	11.750	21.600	34.250
Lampung Tengah	1.900	14.000	31.800	41.750
Lampung Utara	1.100	13.750	33.700	22.250
Way Kanan	1.050	11.000	18.000	21.500
Tulang Bawang	2.200	13.000	20.500	17.000
Tulang Bawang Barat	-	-	-	6.250
Pesawaran	-	-	6.900	9.000
Bandar Lampung	-	-	-	-
Metro	-	-	-	-
Mesuji	-	-	-	11.000
Pringsewu	-	-	-	9.000
Lampung	13.950	117.750	224.500	277.000

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, 2011

**Keterangan: (-) Data tidak tersedia

Tabel 2 menunjukkan sebaran atau alokasi dana bantuan langsung mandiri (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan per kabupaten di Provinsi Lampung. Dana BLM PNPM-Mandiri Perdesaan yang diterima oleh Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun meningkat. Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut sesuai dengan usulan dari pemerintah daerah dan melihat kelayakan kegiatan yang ditawarkan serta mempertimbangkan hasil evaluasi realisasi program yang dijalankan di daerah tersebut. Dana tersebut di atas dialihkan ke beberapa kecamatan yang

ada di Provinsi Lampung. Jumlah kecamatan per kabupaten yang menerima bantuan PNPM-Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah kecamatan per kabupaten di Provinsi Lampung yang menerima bantuan PNPM-MP di Propinsi Lampung tahun 2010

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menerima bantuan PNPM-MP
Lampung Barat	17
Tanggamus	9
Lampung Selatan	15
Lampung Timur	13
Lampung Tengah	17
Lampung Utara	8
Way Kanan	8
Tulang Bawang	7
Tulang Bawang Barat	3
Pesawaran	3
Bandar Lampung	-
Metro	-
Mesuji	3
Pringsewu	4
Jumlah	107

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Lampung, 2011

**Keterangan: (-) Tidak mendapatkan bantuan program PNPM-Mandiri Perdesaan

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 12 Kabupaten yang menerima bantuan PNPM-Mandiri Perdesaan di Propinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang menerima Program PNPM-Mandiri Perdesaan. Program PNPM-Mandiri Perdesaan terdapat di 9 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus, sedangkan kecamatan yang lain mendapatkan bantuan program PNPM Mandiri yang lain yakni PNPM Infrastruktur Perdesaan. Data lokasi dan alokasi BLM program

PNPM Mandiri Perdesaan per kecamatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data lokasi dan alokasi BLM PNPM-MP per kecamatan di Kabupaten Tanggamus tahun 2010

Kecamatan	Jumlah Desa	BLM (Rp. x juta)		
		APBD	APBN	Jumlah
Air Naningan	9	450,0	1.800,0	2.250,0
Bandar Negeri Semuong	10	600,0	2.400,0	3.000,0
Bulok	9	600,0	2.400,0	3.000,0
Cukuh Balak	18	600,0	2.400,0	3.000,0
Kelumbayan Barat	6	600,0	2.400,0	3.000,0
Pugung	25	600,0	2.400,0	3.000,0
Pulau Panggung	18	450,0	1.800,0	2.250,0
Talang Padang	19	450,0	1.800,0	2.250,0
Wonosobo	23	600,0	2.400,0	3.000,0
Jumlah	137	4.950,0	19.800,0	24.750,0

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, 2011

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Wonosobo mendapatkan dana BLM sebesar Rp 3.000.000.000,- yang berasal dari APBD dan APBN. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan di 23 pekon yang ada di Kecamatan Wonosobo. Dana tersebut relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kecamatan yang lain mengingat kecamatan lain mendapatkan jumlah dana yang sama dengan jumlah pekon yang lebih sedikit.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang menggunakan konsep pemberdayaan. Visi PNPM-Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk

memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2010).

Lebih lanjut, Strategi yang dikembangkan PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. PNPM-Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan. Melalui PNPM-Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM-Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku yang ada di desa dan berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing, dan pembina yakni Kepala Desa, BPD, TPK, TPU, Tim Pemantau, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pokmas.

Keberhasilan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada pada program PNPM-Mandiri Perdesaan tidak lepas dari peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). KPMD dituntut mempunyai kemampuan teknis dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan

Rumah Tangga Miskin (RTM). Kecamatan Wonosobo memiliki dua orang KPMD per pekan. KPMD yang terpilih mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM-Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa serta memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah desa. Data jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) per kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) per kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2010

Kabupaten	Jumlah kecamatan yang menerima PNPM-MP	Jumlah desa	Jumlah KPMD
Lambar	17	201	402
Way Kanan	8	129	204
Tulang Bawang	7	62	124
Mesuji	3	25	50
Lampung Timur	13	162	324
Pesawaran	3	62	124
Lampung Selatan	15	221	442
Lampung Tengah	17	191	382
Lampung Utara	8	70	140
Tanggamus	9	137	274
Pringsewu	4	64	128
Tulang Bawang Barat	3	31	62
Jumlah	107	1.355	2.656

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, 2011

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang ada di Provinsi Lampung yakni sebanyak 2.656 orang yang tersebar di 12 Kabupaten yang ada di Lampung yang mendapatkan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Salah satu dari kabupaten yang mendapatkan program PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut yakni Kabupaten Tanggamus

yang memiliki 274 orang KPMD yang tersebar di 9 Kecamatan yang mendapat bantuan program PNPM-Mandiri Perdesaan.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertugas memfasilitasi atau memandu seluruh anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan PNPM-Mandiri Perdesaan di desa secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai dengan kebutuhan yang paling prioritas didesanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Peranan KPMD merupakan mekanisme yang sangat penting dalam PNPM-Mandiri Perdesaan. KPMD tidak hanya dituntut mempunyai kemampuan teknis dalam penulisan usulan tetapi juga dituntut untuk dapat merangkul masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program.

Kerjasama yang baik antar semua pelaku program PNPM-Mandiri Perdesaan akan mempercepat pembangunan desa-desa.

Kegiatan pembangunan yang ada pada program PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan hasil keputusan dari musyawarah setiap pekon. Pelaksanaan kegiatan program PNPM-Mandiri Perdesaan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat.

Keberhasilan program PNPM-Mandiri Perdesaan bergantung pada besarnya tingkat partisipasi masyarakat dan seluruh pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan. Tanpa adanya dukungan melalui partisipasi dari masyarakat maka program pemberdayaan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu

1. Bagaimana tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?
3. Apakah ada hubungan antara tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
3. Hubungan antara tingkat peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu penyuluhan pembangunan dalam rangka melakukan program pengentasan kemiskinan masyarakat desa khususnya di Kabupaten Tanggamus.
2. Sumbangan pemikiran bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.